

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG



BADAN AKUNTABILITAS PUBLIK DPD RI MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Bandar Lampung, Rabu (20 November 2024) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI. Pertemuan dilakukan di Auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan dihadiri oleh Ketua BAP DPD RI, Abdul Hakim; Wakil Ketua I BAP DPD RI, Yulianus Henock Sumual; dan 15 Anggota DPD lainnya; serta Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Masmudi didampingi oleh para pejabat struktural dan fungsional pemeriksa madya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan memberikan opini atas Laporan Keuangan. Selanjutnya dalam Peraturan BPK No.1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK pada Pasal 400 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK menyelenggarakan fungsi pemantauan penyelesaian kerugian daerah serta BPK melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPD RI mempunyai tugas sebagaimana diamanatkan dalam Tatib DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 83, yaitu melakukan penelaahan dan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara yang disampaikan kepada DPD atas permintaan Komite IV dan menampung serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait korupsi dan maladministrasi yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

BAP DPD RI menindaklanjuti rekomendasi BPK dari aspek “Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan” khususnya yang berindikasi kerugian negara, baik yang riil maupun potensial, termasuk kerugian yang bersumber dari penerimaan negara, serta guna mendapatkan pandangan dan penjelasan yang komprehensif terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Semester II Tahun 2023.

Dalam rapat konsultasi tersebut Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Lampung memberikan pemaparan mengenai Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian pada Pemerintah Daerah dan BUMD, Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah, Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu – Kepatuhan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung. Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan ini BAP DPD RI dapat mengetahui pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI oleh pemerintah daerah serta dapat menjadi bahan dan masukan bagi penyusunan rekomendasi BAP DPD RI atas IHPS II Tahun 2023 BPK RI.

Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Telp : 0721-474828
Email : humastu.lampung@bpk.go.id
Hotline : 081369694488